

BAB II

KONDISI NEGARA-NEGARA DI KAWASAN AFRIKA UTARA SEBELUM KONFERENSI ASIA AFRIKA

2.1 Kondisi Politik

Istilah politik berasal dari kata *politic* dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada sifat pribadi atau tindakan yang bijaksana, tepat, dan penuh pertimbangan. Dalam kamus, kata ini diartikan sebagai *acting or judging wisely, well-judged, prudent*. Secara etimologis, politik berakar dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politikos*, yang berarti berkaitan dengan warga negara (*relating to a citizen*), dan berasal dari kata polis yang berarti kota. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mencakup segala hal yang berhubungan dengan urusan, kebijakan, atau tindakan pemerintahan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, politik juga dapat merujuk pada siasat, strategi, bahkan kelecikan, serta digunakan sebagai istilah untuk menyebut suatu cabang ilmu, yaitu ilmu politik.

Menurut Noer, politik mencakup segala bentuk aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan, serta bertujuan untuk mempengaruhi melalui upaya mempertahankan maupun mengubah tatanan masyarakat yang ada.²⁶ Dengan kata lain, politik merupakan serangkaian kebijakan yang dirancang secara sistematis agar ditaati dan diikuti oleh seluruh warga negara dalam suatu wilayah, sehingga pemerintahan dapat berjalan melalui instrumen yang disebut politik. Pada akhirnya, politik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat,

²⁶ Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983, hlm. 23.

namun juga berpotensi memicu perlawanan jika sistem kekuasaan yang diterapkan dianggap tidak adil.²⁷

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai politik pemerintahan dari negara-negara di Benua Afrika yaitu Maroko, Tunisia dan Aljazair sebelum merdeka. Perebutan kekuasaan dan politik akibat pembagian wilayah jajahan untuk dijadikan wilayah kekuasaan yang tidak memperhatikan kondisi etnis, agama, budaya menjadi salah satu faktor penyebab konflik negara-negara di Benua Afrika. Berbagai macam jalur diplomasi banyak digunakan oleh negara-negara di Afrika Utara untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Teori diplomasi menurut Satow menekankan kecermatan, kehati-hatian, dan kemampuan negosiasi sebagai sarana utama dalam menjalankan hubungan antarnegara. Ia juga menekankan pentingnya pengakuan kedaulatan, keanggotaan dalam masyarakat negara berdaulat, dan penggunaan diplomasi sebagai alat damai untuk memperjuangkan kepentingan nasional.²⁸

Diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam hubungan internasional yang digunakan negara untuk menjalin hubungan, menyampaikan kepentingan, dan menghindari konflik. Bagi negara-negara di Afrika, terutama yang tengah berjuang untuk kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20, diplomasi menjadi alat penting untuk mendapatkan pengakuan internasional, memperjuangkan dekolonisasi, serta membangun posisi di tengah sistem internasional yang didominasi oleh negara-negara Barat.

²⁷ Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat Cetakan II Versi Revisi*. Bandung: Pustaka Mizan, 1997, hlm. 11.

²⁸ Satow, *loc.cit.*

2.1.1 Maroko

Maroko, yang memiliki nama resmi *al-Mamlakah al-Maghribiyyah* atau Kerajaan Maroko, merupakan sebuah negara monarki yang terletak di kawasan Maghrib. Istilah Maghrib berasal dari bahasa Arab yang berarti "Barat" atau tempat terbenamnya matahari. Secara historis, sebutan ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang membentang dari sebelah barat Sungai Nil hingga ke pesisir Atlantik di Afrika Utara. Dalam konteks negara modern, wilayah Maghreb meliputi Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Sahara Barat, meskipun status Sahara Barat tidak diakui secara universal. Berdasarkan konstitusinya, Maroko merupakan negara Muslim yang berdaulat dengan Islam sebagai agama resmi, namun tetap menjamin kebebasan berpikir, beragama, berpendapat, dan berkumpul, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Sunni mazhab Maliki. Maroko juga dikenal sebagai salah satu negara di Afrika yang mayoritas penduduknya, sekitar 99%, memeluk agama Islam.²⁹

Maroko adalah salah satu negara di Afrika. Maroko berbatasan darat dengan negara Aljazair di bagian barat, dengan Sahara Barat di bagian barat daya, selat Gibraltar, yang memisahkan Maroko dengan Eropa, khususnya Spanyol, dan Samudra Atlantik di bagian barat. Maroko berada di titik pertemuan antara tiga benua: Eropa, Afrika, dan Asia. Negara ini memiliki empat ibu kota yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, Rabat sebagai pusat pemerintahan, Casablanca sebagai pusat perdagangan dan industri, Marrakech sebagai kota pariwisata, serta Fes sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Secara geografis, wilayah

²⁹ Riza Sihabudi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Bandung: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 117.

Maroko terbagi menjadi lima bagian utama, yaitu daerah pegunungan, lahan subur di sebelah barat, tanah berlumpur di barat daya, wilayah pertanian di bagian tengah, serta kawasan gurun yang berbatasan dengan Sahara. Kawasan pegunungan di Maroko sendiri terbagi menjadi tiga wilayah: Pegunungan Atlas Tengah (*Middle Atlas*), Atlas Tinggi (*High Atlas*), dan *Anti Atlas Ranges*.³⁰

Maroko dapat digolongkan sebagai negara yang memiliki sejarah panjang, karena sejak era sebelum Masehi, wilayah ini telah menjalin interaksi dengan berbagai peradaban besar dunia, sejajar dengan negara-negara tetangganya seperti Tunisia, Libya, dan Aljazair. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Maroko yang sangat strategis, berada di tepi Laut Mediterania yaitu sebuah wilayah yang dahulu menjadi pusat aktivitas peradaban maritim. Maroko menjadi target ekspansi kekuatan Eropa karena lokasinya yang penting di Afrika Utara dan kekayaan sumber dayanya. Persaingan antar negara Eropa atas wilayah ini menimbulkan ketegangan yang memicu krisis internasional, seperti Krisis Maroko I (1905) dan Krisis Maroko II (1911), yang kemudian membuka jalan bagi terbentuknya sistem protektorat.³¹

Maroko mengalami intervensi politik intensif dari kekuatan kolonial, terutama Prancis dan Spanyol. Intervensi ini dimulai secara formal pada tahun 1912 melalui Perjanjian Fez, yang menjadikan Maroko sebagai negara protektorat Prancis. Dalam sistem ini, Sultan Maroko tetap diangkat, tetapi hanya berperan sebagai simbol agama dan budaya tanpa kekuasaan politik nyata. Kekuasaan

³⁰ Raphael Chijoke Njoku, *Culture and Costumes of Morocco*. USA: Greenwood Press 2006, hlm. 24.

³¹ Susan Gilson Miller, *A History of Modern Morocco*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, hlm. 85-88.

administratif, keuangan, militer, dan hubungan luar negeri sepenuhnya dikendalikan oleh Residen Jenderal Prancis di Rabat. Prancis juga membentuk sistem hukum dualistik yang membedakan antara penduduk lokal dan orang Eropa, sehingga mengukuhkan dominasi politik kolonial.³²

Institusi-institusi tradisional seperti pengadilan syariah, majelis ulama, dan pemimpin lokal secara sistematis dilemahkan. Prancis menunjuk pemimpin lokal (*qa'id*) yang setia pada mereka, dan menyusun birokrasi kolonial untuk mencegah tumbuhnya elite politik pribumi. Pemerintah kolonial juga memberlakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik. Organisasi politik nasionalis dilarang, aktivis diawasi atau diasingkan, dan media massa disensor untuk mencegah penyebaran gagasan anti-kolonial. Tokoh penting seperti Allal al-Fassi dari Partai Istiqlal bahkan ditangkap dan diasingkan ke Afrika Barat oleh otoritas Prancis.³³

Wilayah Maroko dipisahkan secara politis menjadi tiga zona yaitu wilayah tengah yang dikuasai Prancis, wilayah utara (Rif) dan selatan (Sidi Ifni) yang dikuasai Spanyol, serta Tangier sebagai zona internasional. Fragmentasi ini menyulitkan koordinasi gerakan nasional dan semakin memperkuat kontrol kolonial. Namun, setelah Perang Dunia II, gerakan nasionalis semakin kuat. Pada tahun 1944, Partai Istiqlal secara resmi menyerukan kemerdekaan penuh bagi Maroko. Pemerintah kolonial Prancis menanggapi dengan tindakan represif, termasuk menahan para aktivis dan memperkuat pasukan keamanan. Pada tahun 1953, Prancis mengasingkan Sultan Muhammad V ke Madagaskar karena

³² Edmund Burke III, *The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam*. Berkeley: University of California Press, 2014, hlm. 104-106.

³³ David S. Woolman, *Rebels in the Rif: Abd el Krim and the Rif Rebellion*. Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 45-47.

dianggap mendukung gerakan nasionalis, yang kemudian memicu perlawanan rakyat bersenjata dan menumbuhkan simpati internasional.³⁴

Semua bentuk intervensi politik ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme melemahkan kedaulatan politik Maroko dan membungkam aspirasi rakyatnya. Namun, justru penindasan ini yang mendorong lahirnya solidaritas antikolonial yang menguat menjelang Konferensi Asia Afrika. Maroko, bersama negara-negara Afrika dan Asia lainnya, menjadi bagian penting dalam gerakan solidaritas global melawan imperialisme Barat.³⁵

2.1.2 Tunisia

Tunisia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Utara. Negara ini berpenduduk mayoritas Muslim dan terletak di pesisir Laut Tengah, dengan Aljazair di sebelah barat serta Libya di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Tunisia memiliki letak yang strategis karena menjadi penghubung antara benua Eropa dan Afrika, serta antara wilayah Arab bagian timur dan barat. Secara resmi, negara ini dikenal dengan nama Republik Tunisia atau *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*.

Tunisia dengan letaknya yang strategis, telah lama menjadi incaran berbagai kekuatan asing untuk dijadikan wilayah jajahan. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang mengalami berbagai bentuk penjajahan. Sejumlah bangsa pernah datang dan menguasai Tunisia, antara lain bangsa Fenisia, Romawi, Vandal, Bizantium, Arab, Turki Utsmani, dan yang paling akhir adalah

³⁴ C.R. Pennell, *Morocco Since 1830: A History*. New York: NYU Press, 2000, hlm. 190-194.

³⁵ Martin Evans & John Phillips, *Algeria: Anger of the Dispossessed*. New Haven dan London: Yale University Press, 2007, hlm. 89-91.

Prancis. Awalnya, Tunisia dihuni oleh penduduk asli yang dikenal sebagai suku Berber. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini dikenal dengan nama *Ifriqiya*.³⁶ Seperti halnya di Indonesia, mayoritas penduduk Tunisia memeluk agama Islam.³⁷

Pada masa Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 belum dilaksanakan, Tunisia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis dan sedang dalam fase penting perjuangan menuju kemerdekaan. Situasi politiknya ditandai dengan pertarungan antara gerakan nasionalis Tunisia dan kekuasaan kolonial Prancis. Tunisia direbut oleh Prancis pada 12 Mei 1881, setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Turki Usmani karena Perjanjian Bardo (1881). Peristiwa ini mengubah status Tunisia menjadi negara jajahan Perancis. Walaupun secara tertulis Tunisia masih memiliki seorang Bey (penguasa tradisional), kekuasaan sebenarnya berada di tangan Residen Jenderal Prancis yang mengendalikan pemerintahan. Pemerintahan kolonial Prancis secara sistematis mengurangi peran lembaga-lembaga lokal dan menggantinya dengan institusi kolonial yang dikendalikan oleh pejabat Prancis. Bahkan, sistem hukum Islam dan adat yang sebelumnya berlaku digantikan secara bertahap dengan sistem hukum sipil Prancis.³⁸

Dari aspek politik, Prancis membatasi partisipasi rakyat Tunisia dalam pemerintahan dan menindak keras kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan. Organisasi nasionalis seperti Destour (1920-an) dan kemudian Neo-

³⁶ Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam 5 Sya-Zun*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999: hlm. 112.

³⁷ Miftahul Khoiri, Nur Anwar, "Islam dan Demokrasi di Tunisia," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol. 1, no. 2. 2022: hlm. 151.

³⁸ Latifa Lakhdar, "Law and Modernity in Colonial Tunisia," dalam *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, vol. 22, no. 1-2. 2002: hlm. 114-116.

Destour yang didirikan pada tahun 1934 oleh Habib Bourguiba, menjadi sasaran penindasan. Bourguiba sendiri beberapa kali dipenjarakan dan diasingkan karena aktivitasnya menentang kolonialisme.³⁹ Pemerintah kolonial juga mengontrol ketat pers, pendidikan, dan organisasi sosial untuk membatasi berkembangnya kesadaran politik di kalangan rakyat Tunisia. Meskipun demikian, gerakan nasionalis tetap berkembang dengan menggalang kekuatan dari kalangan pelajar, ulama, dan kelas menengah perkotaan yang terdidik.

Selain itu, Prancis memanfaatkan elite tradisional yang pro-kolonial untuk memperkuat kekuasaannya dan memecah belah gerakan perlawanan. Namun, strategi ini pada akhirnya gagal menghentikan desakan rakyat Tunisia untuk memperoleh kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, tekanan nasionalis semakin meningkat, dan berbagai aksi pemogokan serta demonstrasi massal mewarnai perjuangan rakyat Tunisia. Reaksi keras Prancis, termasuk penangkapan tokoh-tokoh nasionalis dan penggunaan kekerasan terhadap demonstran, justru mendorong simpati internasional terhadap perjuangan Tunisia. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 memperkuat posisi Tunisia dalam forum internasional sebagai bangsa yang masih dijajah dan memperkuat tekanan terhadap Prancis untuk memberikan kemerdekaan.⁴⁰

Pada akhirnya, kombinasi antara tekanan internal dan diplomasi internasional mengarah pada kemerdekaan Tunisia yang diraih pada 20 Maret 1956. Perjuangan rakyat Tunisia menghadapi intervensi kolonial Prancis sebelum

³⁹ Charles-André Julien, *North Africa: From the French Conquest to Independence*. London: Praeger, 1970, hlm. 271-274.

⁴⁰ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ke Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987, hlm. 232.

KAA menunjukkan bagaimana kolonialisme Eropa mengekang kedaulatan politik dan budaya negara jajahan, namun pada saat yang sama mendorong lahirnya kesadaran nasional yang kuat.

2.1.3 Aljazair

Suku Berber, yang juga dikenal dengan sebutan Amazigh (jamaknya: *Imazighen*), merupakan penduduk asli Aljazair dan wilayah Afrika Utara lainnya seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mauritania, serta sebagian Mali dan Niger. Mereka telah mendiami kawasan ini sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kedatangan bangsa Arab maupun kolonial Eropa. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang suku Berber telah tinggal di wilayah Maghreb sejak zaman prasejarah, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka membentuk komunitas agraris dan semi-nomaden dengan budaya yang khas, termasuk bahasa Tamazight, sistem sosial, kesenian, dan arsitektur tradisional.

Pada masa kuno, wilayah yang dihuni suku Berber berada di bawah pengaruh kekuatan besar seperti Kartago, Romawi, dan Bizantium. Beberapa tokoh penting dari wilayah Berber bahkan tercatat dalam sejarah Romawi, salah satunya adalah St. Augustine dari Hippo, yang berasal dari Numidia (sekarang bagian dari Aljazair timur laut).⁴¹ Memasuki abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Afrika Utara melalui ekspansi Arab. Meskipun banyak suku Berber memeluk Islam, mereka tetap mempertahankan identitas budaya dan sering kali menentang dominasi politik bangsa Arab. Bahkan, sejumlah dinasti besar yang berkuasa di

⁴¹ Phillip K. Hitti, *History of Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002, hlm. 906.

wilayah Maghreb dan Spanyol Muslim berasal dari etnis Berber, seperti Dinasti Almoravid dan Almohad.⁴²

Pada masa awal kedatangan Prancis, Aljazair masih berada di bawah kepemimpinan sejumlah suku dan tokoh-tokoh Sufi. Namun, setelah Prancis berhasil menguasai wilayah tersebut secara menyeluruh, berbagai sektor mengalami perubahan kebijakan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Prancis sengaja memilih pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat, sehingga mereka menghindari tokoh-tokoh sufi yang memiliki kedekatan dengan rakyat. Hal ini memudahkan Prancis dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya tanpa banyak penolakan.⁴³

Aljazair berada dalam cengkeraman kolonialisme Prancis, dan sedang mengalami pergolakan politik yang intens. Berbeda dari Tunisia dan Maroko yang berstatus protektorat, Aljazair dianggap sebagai bagian wilayah integral dari Prancis, bukan sekadar koloni. Namun, dalam praktiknya, rakyat Aljazair diperlakukan sebagai warga kelas dua. Aljazair diserang oleh Prancis pada tahun 1830 dan secara hukum menjadi wilayah metropolitan bagi Prancis. Beramai-ramai imigran dari Prancis, Italia dan Spanyol berhasil menempati tempat-tempat penting di Aljazair. Akhirnya mereka mendapatkan upeti dari penempatan tanah bersama yang dikuasai oleh para pemimpin Prancis. Terdapat tiga departemen administratif di Aljazair, seolah-olah setara dengan wilayah di Prancis. Namun, hanya penduduk keturunan Eropa (kolon pendatang, disebut *pied-noirs*) yang

⁴² John. L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001, hlm. 108.

⁴³ Julia A. Clancy-Smith, *Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters* (Algeria and Tunisia, 1800-1904). Berkeley: University of California Press, 1994, hlm. 63-67

mendapatkan hak politik penuh. Sementara mayoritas Muslim Aljazair (sekitar 90%) dipinggirkan dan ditolak hak sipilnya yang dikenal sebagai *Code de l'indigénat*.⁴⁴

Secara politik, Prancis menyingkirkan sistem pemerintahan tradisional Aljazair, termasuk otoritas para ulama, qadi, dan pemimpin lokal, serta menggantikannya dengan birokrasi kolonial yang dikendalikan oleh pejabat Prancis. Selain itu, pendidikan Islam dan Arab dikekang, sementara sekolah-sekolah kolonial hanya tersedia secara terbatas dan lebih mendorong asimilasi budaya Prancis. Hal ini bertujuan untuk memutus kontinuitas identitas nasional Aljazair dan membangun generasi terjajah yang tunduk secara ideologis.⁴⁵ Pemerintah kolonial juga menindak keras organisasi-organisasi politik lokal yang muncul pada awal abad ke-20, seperti *Étoile Nord-Africaine* dan *Parti du Peuple Algérien* (PPA) yang dipimpin oleh Messali Hadj. Tokoh-tokoh nasionalis ini kerap diasingkan atau dipenjara karena menuntut hak politik dan kemerdekaan.⁴⁶

Sebelum kolonialisasi, sistem pendidikan di Aljazair menekankan pelajaran keagamaan seperti ilmu Al-Qur'an, tafsir, aritmatika, dan pelajaran lainnya. Namun, dengan diberlakukannya kebijakan pendidikan baru oleh pemerintah kolonial Prancis, metode pengajaran diubah sepenuhnya menggunakan bahasa dan budaya Prancis. Akibatnya, banyak sekolah lokal ditutup, dan mayoritas anak-anak tidak lagi dapat mengakses pendidikan. Hanya keluarga dari kalangan elit

⁴⁴ Todd Shepard, *The Invention of Decolonization: The Algerian War and the Remaking of France*. Ithaca: Cornell University Press, 2006, hlm. 15-18.

⁴⁵ Marnia Lazreg, *The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question*. New York: Routledge, 1994, hlm. 34-36.

⁴⁶ Charles-Robert Ageron, *Modern Algeria: A History from 1830 to the Present*, trans. Michael Brett. London: Hurst & Company, 1991, hlm. 103-107.

yang memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kehadiran warga Prancis yang datang secara masif ke Aljazair turut mempersempit kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Prancis mulai berusaha menghapus bahasa Arab sebagai bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Berber. Warga Aljazair diwajibkan menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Demi keinginan menarik minat warga Eropa untuk bermigrasi ke Aljazair, Prancis menawarkan iming-iming berupa tanah subur dan lokasi strategis.

Tanah-tanah produktif milik rakyat Aljazair dirampas secara paksa dan dijual dengan harga yang sangat murah. Sementara itu masyarakat lokal mengalami banyak penderitaan, mereka diusir dari kediaman mereka dan dipindahkan ke wilayah-wilayah tandus yang tidak layak huni.⁴⁷

Menjelang Konferensi Asia Afrika, situasi di Aljazair semakin memanas. Meskipun Prancis mencoba mempertahankan status kolonialnya, gerakan nasionalis Aljazair semakin kuat. Terbentuknya *Front de Libération Nationale* (FLN) pada tahun 1954 menandai dimulainya perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan, yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Aljazair.⁴⁸ Perlawanan ini tidak hanya dilandasi oleh ketidakadilan kolonial, tetapi juga terinspirasi oleh solidaritas dan semangat anti-imperialisme yang digaungkan oleh negara-negara Asia dan Afrika, termasuk dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang mendukung hak bangsa-bangsa untuk merdeka. Pada 5 Juli 1962, Aljazair secara resmi meraih kemerdekaannya dari Prancis. Perjuangan panjang ini menjadikan

⁴⁷ Camille Rousset, *Conquete De L Algerie 1841-1887*. Paris: Librairie Plon, 1889, hlm. 57.

⁴⁸ Alistair Horne, *A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962*. New York: New York Review Books, 2006, hlm. 41-44.

Aljazair sebagai simbol penting perlawanan anti-kolonial dan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di negara-negara Afrika dan Asia lainnya.

2.2 Kondisi Ekonomi Negara di Kawasan Afrika Utara

Dalam literatur ekonomi, istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani: *Oikos* (*Oiku*) dan *Nomos*. Secara singkat, *Oikos* berarti ruang hidup, sedangkan *Nomos* berarti alam, hukum, atau pengelolaan. Secara umum, ekonomi berkaitan dengan kualitas hidup dalam sebuah keluarga, yang tidak hanya mencakup satu keluarga yang terdiri dari orang tua, saudara, dan anak-anak.

Menurut Abraham Maslow ekonomi merupakan salah satu bidang studi yang mencoba untuk mengatasi suatu masalah kebutuhan mendasar keberadaan manusia melalui peningkatan segala sumber ekonomi saat ini yang bergantung pada prinsip serta teori tertentu dalam kerangka ekonomi yang dianggap menarik dan efektif.⁴⁹

Perekonomian di negara-negara Afrika kebanyakan masih sangat buruk dan sebagian besar masih dirugikan akibat penjajahana. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana situasi dari sisi perekonomian negara-negara di benua Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaannya seperti negara Maroko, Tunisia dan Aljazair.

2.2.1 Maroko

Sebelum Prancis menjadikan Maroko sebagai negara protektorat pada tahun 1912, Maroko sudah berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan, baik secara politik maupun ekonomi. Pada abad ke-19, Maroko mengalami penjajahan

⁴⁹ Herispon, *Buku Ajar Ekonomi Makro*. Pekanbaru: Akademi Keuangan & Perbankan Riau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2009, hlm. 5.

oleh bangsa Eropa di wilayah Maghrib. Jika hal ini terjadi, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perkembangan Maroko, terutama bagi kebebasan negara Maroko sendiri.⁵⁰

Perjalanan yang cukup panjang membawa Maroko ke bawah kekuasaan Prancis dimulai pada tahun 1830, ketika Prancis melakukan invasi militer di Aljazair.⁵¹ Dari saat itu kolonialisme mulai disadari oleh orang-orang Maroko dari berbagai daerah.⁵² Selain itu, terdapat juga orang Austria di Larache, sebuah kota dermaga besar di wilayah Tanger-Tetouan selatan Maroko. Khususnya, kedua insiden ini menyebarkan keyakinan umum bahwa orang-orang yang beragama kristen akan menghancurkan seluruh sistem di Maroko.⁵³

Pada tahun 1883, di tengah krisis ekonomi yang tak kunjung usai, Hassan I sebagai Sultan Alawiyah di Maroko, menerapkan kebijakan pajak produksi pertanian. Langkah ini diambil agar Maroko tidak jatuh ke dalam kebangkrutan, meskipun ia harus melanggar hukum yang ditetapkan oleh otoritas ulama mengenai pendapatan pajak. Namun, orang Eropa yang tinggal di Maroko, baik sebagai pedagang maupun bukan, menolak tidak mau membayar pajak yang ditetapkan oleh sultan. Akhirnya, kebijakan baru ini tidak berhasil meningkatkan perekonomian Maroko di tengah krisis yang sedang berlangsung. Perekonomian Maroko pun secara bertahap semakin memburuk di tahun-tahun berikutnya.

⁵⁰ Riyadi, *Sejarah Afrika dari Masa Kuno hingga Modern*. Surabaya: Unesa Press, 2016, hlm. 102.

⁵¹ Thomas K. Park, Aomar Bourn, *Historical Dictionary of Morocco*. Second Edition. Oxford: Scarecrow Press Inc, 2005, hlm. 65.

⁵² C. R. Pennell, *Morocco: From Empire to Independence*. Oxford: One World, 2003, p. 115.

⁵³ Pennel, *op. cit*, hlm. 116.

Runtuhnya Aljazair yang signifikan di taklukan Turki Utsmani, Prancis berhasil menghancurkan hubungan diplomatik antara Maroko dan Turki Utsmani, yang biasanya dilakukan melalui Aljazair.⁵⁴ Dengan mempertimbangkan hal ini, posisi Maroko di Maghrib (wilayah bagian barat Afrika Utara) menjadi semakin merugikan, ditambah dengan banyaknya invasi politik kolonialis dari negara-negara Eropa telah memengaruhi wilayah tersebut. Meskipun demikian, Maroko tetap memberikan bantuan perlawanan kepada Aljazair dalam upayanya untuk melawan Prancis. Namun tetap saja, kekuatan militer Maroko tidak sebanding dengan kekuatan militer Prancis.⁵⁵

Di masa berikutnya, Maroko tidak hanya mendapatkan invasi dari Prancis dan Austria. Spanyol dan Inggris juga ikut serta dalam ekspedisi untuk menguasai sebagian tanah paling subur di ujung wilayah Maroko. Secara sederhana, hal ini berdampak besar pada perekonomian Maroko. Sebagai contoh, invasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa tidak hanya memiliki dampak politik, tetapi juga dari segi ekonomi. Larache (kota perdagangan) yang tadinya direbut oleh bangsa Austria kini menjadi wilayah para pedagang dari Eropa. Hingga akhirnya persaingan pedagang lokal dikalahkan oleh pedagang luar dari Eropa.⁵⁶

Pedagang Maroko hanya berhasil dalam penjualan di dalam negeri, karena para ulama menetapkan aturan yang melarang mereka untuk menjual atau membeli barang dari orang-orang Eropa Kristen, yang dianggap kafir menurut pandangan ulama. Selain itu, otoritas ulama juga melarang sultan untuk

⁵⁴ Edmund Burke, *Prelude to Protectorate in Morocco: Pre-Colonial Protets and Resistance 1860-1912*. Chicago: The University Press, 1976, hlm. 22.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Pennell, *op. cit*, hlm. 47-51.

meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Perekonomian Maroko semakin menurun yang diakibatkan oleh datangnya kehidupan orang Eropa. Para sultan yang memilih untuk mengeksport di sektor-sektor lokal khas Maroko, seperti gandum, kain wol, kulit, lilin, dan karet, jelas telah membuat keputusan yang baik. Namun, hal ini juga dihancurkan oleh orang Eropa dengan adanya Perjanjian Negosiasi Perdagangan antara Prancis dan Inggris, yang memberikan dasar hukum yang jelas bagi investor asing untuk menguasai perdagangan di Maroko. Pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian Maroko jelas tidak memiliki fondasi yang kuat, yang menyebabkan kemunduran bagi negara tersebut.⁵⁷

Selain sektor ekonomi, ketidakstabilan situasi di Maroko juga disebabkan oleh kebijakan politik kolonial yang bertujuan untuk membentuk identitas baru yang lebih condong ke arah identitas Eropa. Upaya ini mencakup transformasi sosial dan budaya yang dirancang untuk melemahkan struktur tradisional Maroko, termasuk peran agama, adat, dan otoritas lokal. Dalam konteks kolonial, kebijakan politik menjadi prioritas utama bagi kekuatan kolonial seperti Prancis, bahkan lebih dominan dibandingkan kepentingan ekonomi. Salah satu strategi kolonial adalah menggeser pengaruh Islam dan institusi keagamaan tradisional agar tidak lagi menjadi pusat kehidupan publik. Akibatnya, dalam beberapa dekade terakhir

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 53-58.

masa kolonial, agama tidak lagi menjadi fokus utama bagi para kolonialis, karena proyek identitas dan penguasaan politik lebih diutamakan.⁵⁸

Sejak tahun 1934, kesadaran politik dan ekonomi mulai tumbuh di kalangan penduduk di kota-kota kecil seperti Ouezzane, yang terletak di wilayah Jbala di perbatasan antara wilayah Spanyol dan Prancis. Aksi protes mulai muncul secara sporadis di daerah tersebut. Tidak hanya para pedagang yang melakukan protes untuk memperjuangkan nasib mereka selama era Protektorat Prancis, tetapi juga kelompok adat setempat yang mulai menyadari berbagai peristiwa di Fez melalui tokoh-tokoh dan beberapa pelajar yang berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung beserta kota-kota lainnya mulai bertambah. Pada saat ini, para pedagang kecil juga memiliki peran yang penting. Mereka, yang sering melakukan perjalanan dagang dari daerah pedesaan ke kota-kota besar seperti Fez, Casablanca, Kenitra, dan Tetouan, menyebarkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di kota-kota tersebut saat mereka kembali. Desa-desa kecil lainnya yang terletak di lokasi yang tidak sebagus Ouezzane namun dengan akses yang mudah seperti Boujad dan Sefrou, juga terpengaruh oleh ide-ide nasionalis.⁵⁹

2.2.2 Tunisia

Tunisia kaya akan ekonomi yang berbagai macam, seperti pertambangan, manufaktur, pertanian dan penghasil minyak bumi. Pada sektor perdagangan Tunisia mempunyai kaitan perdagangan yang erat dengan Eropa. yang besar untuk perokonomian di Tunisia. Salah satu negara yang mengalami stagnasi dalam pengembangan industri sains dan filsafat adalah Tunisia.

⁵⁸ Edmund Burke, *op. cit.* hlm. 102-108.

⁵⁹ Robin L. Bidwell, *Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas 1912-1956*. London: Frank Cass, 1973, hlm. 57.

Pada masa sebelum Konferensi Asia Afrika, struktur ekonomi Tunisia sangat bergantung pada sektor pertanian, yang menyumbang sekitar 70% tenaga kerja dan sebagian besar produk ekspor. Komoditas ekspor utama Tunisia meliputi zaitun, anggur, buah sitrus, dan gandum, yang sebagian besar diusahakan oleh pemilik tanah kolonial Prancis atau perusahaan agribisnis yang berbasis di Eropa. Pada tahun 1954, sekitar 20% tanah pertanian subur dikuasai oleh sekitar 15.000 pemukim Eropa, sementara petani Tunisia umumnya hanya memiliki lahan sempit dan mengalami tekanan ekonomi.

Sektor industri hampir tidak berkembang, karena kebijakan kolonial Prancis tidak mendorong industrialisasi lokal agar Tunisia tetap bergantung pada barang jadi dari Prancis. Tunisia juga sangat bergantung pada impor barang manufaktur seperti tekstil, mesin, dan peralatan rumah tangga. Total ekspor Tunisia pada tahun 1954 bernilai sekitar 60 juta Franc Prancis, dan mayoritas perdagangan dilakukan dengan Prancis, yang menyerap lebih dari 65% ekspor Tunisia.⁶⁰

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalur kereta api dan pelabuhan hanya ditujukan untuk menunjang kepentingan ekspor bahan mentah ke Eropa, bukan untuk menghubungkan kawasan pedesaan Tunisia secara merata. Di sisi lain, sektor tenaga kerja mengalami ketimpangan seperti pengangguran cukup tinggi dan kondisi kerja bagi buruh pertanian lokal sangat memprihatinkan. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, karena pada awal 1950-an, tingkat melek huruf hanya sekitar 15%, dan akses orang Tunisia asli ke pendidikan menengah dan tinggi sangat terbatas.

⁶⁰ Ira William., Zartman, *Tunisia: The Political Economy of Reform*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher, 1987, hlm. 167.

Menjelang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, perekonomian Tunisia masih sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial yang dibentuk oleh Prancis sejak negara itu menjadi protektorat pada tahun 1881. Perekonomian Tunisia dirancang untuk melayani kepentingan metropolitan Prancis, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan, sehingga pembangunan ekonomi nasional Tunisia sendiri berlangsung tidak merata dan terbatas.⁶¹

Perekonomian Tunisia pada masa pra-KAA sangat mencerminkan ciri khas ekonomi kolonial: eksploitatif, timpang, dan bergantung pada ekspor komoditas primer. Hal inilah yang mendorong para nasionalis Tunisia, seperti Habib Bourguiba, tidak hanya menuntut kemerdekaan politik, tetapi juga perombakan sistem ekonomi agar berpihak pada rakyat Tunisia sendiri.⁶²

2.2.3 Aljazair

Aljazair merupakan salah satu region dan ekonomi etnik Maghrib yang mendominasi dunia Muslim dari Barat, Libya, hingga Atlantik. Populasi Muslim di Aljazair terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab dan Berber. Suku Berber adalah penduduk asli Aljazair. Aljazair sering kali dengan mudah diadu domba oleh bangsa asing, yang disebabkan oleh pembagian penduduk ke dalam berbagai macam suku.

Charles X ditunjuk oleh raja Prancis untuk melakukan penyerangan di Aljazair pada tahun 1830 setelah Prancis mengalami kesulitan akibat perlawanan

⁶¹ Perkins, Kenneth J, *A History of Modern Tunisia*. New York: Cambridge University Press, 2004, hlm. 223.

⁶² Jamil M. Abun-Nasr, *A History of The Maghrib in The Islamic Period*. English: Cambridge University Press, 1987, hlm. 113.

di Yunani. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Prancis setelah musibah di Yunani. Pada awalnya, Prancis hanya berniat untuk mengambil beberapa kota di pesisir, tetapi karena pemerintah Turki sedang menghadapi banyak masalah, maka Prancis memutuskan untuk melakukan perebutan wilayah secara menyeluruh di Aljazair.⁶³

Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antara Timur dan Barat, terutama dalam konteks ekonomi pajak dan militer (Jannisari) yang sering diwaspadai. Semua ini menyebabkan daerah yang berada di bawah kendali Utsmani mengalami ekonomi yang stabil dan tingkat keamanan yang tinggi. Aljazair memiliki banyak sumber daya alam, seperti minyak zaitun, buah-buahan, dan hasil bumi yang melimpah.⁶⁴ Faktor-faktor ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi Aljazair dan membuat penduduknya menjadi makmur saat itu.

Pada saat dikuasai oleh Turki Utsmani, mereka membangun kekuatan secara tersusun dari sisi politik, militer dan juga ekonomi dengan tujuan mengembangkan Aljazair, namun pada bidang kebudayaan mereka hanya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang dipakai di semua wilayah Afrika Utara salah satunya Aljazair hingga saat ini.

Hampir dua abad yang lalu, saat ekspansi Prancis dimulai, Utsmani mengalami efek yang besar dalam aspek ekonomi dan politik. Perdagangan Eropa yang semakin meluas di wilayah Utsmani membuat pemerintah kehilangan kontrol atas beberapa sumber pendapatan pajak dari berbagai provinsi, yang

⁶³ Syaiful Anam, Sejarah Perkembangan Islam Di Aljazair, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2. 2019: hlm. 84-85.

⁶⁴ Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 98.

mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, kelemahan militer juga menyebabkan krisis keuangan yang berkepanjangan.

Sebelum pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Aljazair berada dalam sistem ekonomi kolonial yang sangat eksploitatif, di bawah kekuasaan langsung Prancis sejak 1830. Tidak seperti Tunisia dan Maroko yang berstatus protektorat, Aljazair secara hukum dianggap sebagai bagian dari wilayah metropolitan Prancis, namun dalam praktiknya, mayoritas penduduk Muslim Aljazair dipinggirkan dari sistem ekonomi, politik, dan pendidikan. Perekonomian Aljazair dirancang untuk melayani kebutuhan industri Prancis, dengan ketimpangan besar antara komunitas pemukim Eropa (*pied-noirs*) dan mayoritas pribumi Aljazair.⁶⁵

Menjelang Konferensi Asia Afrika, perekonomian Aljazair masih sangat terfokus pada sektor pertanian ekspor dan ekstraksi sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, dan bijih besi, yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Prancis. Sektor pertanian dikuasai oleh para pemukim Eropa, yang menguasai sekitar 30% tanah pertanian terbaik, padahal mereka hanya mewakili sekitar 10% dari total populasi. Komoditas pertanian utama seperti anggur, zaitun, jeruk, dan gandum diproduksi untuk ekspor, terutama ke Prancis, dengan lebih dari 65% ekspor Aljazair diarahkan ke pasar metropolitan. Sementara itu, sebagian besar petani Muslim Aljazair hidup dalam kondisi subsisten, sering kali di tanah kering

⁶⁵ Alistair Horne, *op. cit*, hlm. 216.

dan tidak produktif, dan sangat rentan terhadap kemiskinan serta kelaparan musiman.⁶⁶

Total nilai ekspor Aljazair pada awal 1950-an tercatat sekitar 90 juta dolar AS per tahun, sementara impornya yang terdiri dari barang industri seperti mesin, tekstil, dan peralatan rumah tangga dikelola sepenuhnya oleh jaringan dagang kolonial Prancis. Industrialisasi di Aljazair sangat terbatas, dan meskipun ada beberapa industri ringan seperti pengolahan makanan dan pabrik semen, semuanya dikendalikan oleh kapital swasta Prancis. Sebagian besar tenaga kerja pribumi bekerja di sektor informal atau pertanian, dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran sangat tinggi, terutama di kalangan muda.

Ketimpangan sosial-ekonomi juga tercermin dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat melek huruf di kalangan penduduk Muslim Aljazair hanya sekitar 10-15%, sedangkan pendidikan menengah dan tinggi hampir seluruhnya diakses oleh kelompok Eropa. Pada tahun 1954, hanya ada sekitar 2.000 mahasiswa Muslim yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi dari total populasi lebih dari 8 juta jiwa. Semua kondisi ini menandakan bahwa ekonomi Aljazair menjelang KAA tidak hanya timpang dan eksploitatif, tetapi juga memicu ketidakpuasan yang menjadi bahan bakar utama Revolusi Kemerdekaan Aljazair yang meletus pada 1 November 1954, hanya beberapa bulan sebelum konferensi tersebut.⁶⁷

⁶⁶ John Douglas Ruedy, *Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation*. Bloomington: Indiana University Press, 1992, hlm. 143.

⁶⁷ Benjamin Stora, *Algeria, 1830-2000: A Short History*. Ithaca: Cornell University Press, 2001, hlm. 151.

2.3 Kondisi Sosial Budaya Negara di Kawasan Afrika Utara

Sebelum Konferensi Asia Afrika, masyarakat Afrika Utara hidup dalam sistem sosial yang sangat terstruktur oleh kekuasaan kolonial. Kolonialisme tidak hanya mengendalikan ekonomi dan politik, tetapi juga mengubah struktur budaya masyarakat lokal, terutama dalam bahasa, pendidikan, dan norma sosial. Di negara-negara seperti Aljazair, Prancis memberlakukan asimilasi budaya, yang memarginalkan bahasa Arab dan budaya Islam serta menggantinya dengan budaya Prancis.⁶⁸

Bahasa dan pendidikan menjadi alat utama kolonial untuk memperluas pengaruh budaya Eropa. Sekolah-sekolah kolonial hanya terbuka terbatas bagi elit lokal dan mengajarkan kurikulum yang berorientasi Eropa, sehingga memunculkan dualitas budaya antara mereka yang berpendidikan ala Barat dan rakyat yang tetap memegang tradisi lokal.⁶⁹

Dalam kehidupan sosial, ketimpangan rasial dan diskriminasi sangat mencolok. Penjajah memperoleh hak-hak istimewa, sedangkan penduduk asli diperlakukan sebagai kelas kedua. Di Aljazair, misalnya, hukum kode Prancis hanya berlaku bagi warga Eropa, sedangkan penduduk Muslim tunduk pada hukum adat dan Islam, yang sering kali dinilai inferior oleh pihak kolonial.⁷⁰

Meski demikian, budaya lokal di Aljazair tidak sepenuhnya hilang. Nilai-nilai Islam, bahasa Arab, dan tradisi Berber terus dijaga melalui madrasah, tarekat sufi, dan komunitas desa. Musik, cerita rakyat, dan kesenian lokal tetap hidup,

⁶⁸ Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*. London, Inggris: Faber and Faber, 1991, hlm. 319-323.

⁶⁹ Julia Clancy-Smith, *North Africa, Islam and the Mediterranean World from the Almoravids to the Algerian War*. London: Routledge, 2011, hlm. 205-210.

⁷⁰ Ruedy, *op. cit.*, hlm. 103-105.

walau sering dikesampingkan dalam ruang publik formal. Justru dalam situasi penindasan budaya inilah mulai tumbuh gerakan kebangkitan budaya nasionalis, yang kemudian menjadi pendorong kemerdekaan setelah KAA.⁷¹

2.3.1 Maroko

Maroko berada dalam masa penjajahan sebagai wilayah protektorat Prancis dan Spanyol sejak tahun 1912.⁷² Secara sosial budaya, masyarakat Maroko terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Arab, Berber, Yahudi, serta kelompok minoritas lainnya. Islam Sunni merupakan agama mayoritas, namun keberadaan komunitas Yahudi dan tradisi lokal Berber menunjukkan adanya keragaman budaya dan keagamaan yang tinggi. Struktur pemerintahan tradisional berbasis sistem *Makhzen* tetap dipertahankan oleh kolonial, di mana Sultan memegang kekuasaan simbolik yang dibingkai dalam syariat Islam dan sistem *Sharifism*. Namun, wilayah pedalaman seperti Pegunungan Atlas dan Rif sering berada di luar kendali pusat.⁷³

Setelah ditetapkannya Maroko sebagai protektorat Prancis tahun 1912, otoritas kolonial mulai membentuk sistem pendidikan ganda: satu sistem modern berbahasa Prancis yang ditujukan untuk kalangan elite terpilih dan loyalis kolonial, serta satu sistem tradisional Islam yang dipertahankan namun mengalami marginalisasi.⁷⁴ Pendidikan modern ala Prancis menekankan pelajaran sekuler,

⁷¹ James McDougall, *History and the Culture of Nationalism in Algeria*. Cambridge University Press, 2006, hlm. 94-98.

⁷² C.R. Pennell, *op. cit*, hlm. 153-155.

⁷³ David Seddon & Lisa Ehlers, "Berber Identity and the Politics of Ethnicity in North Africa," *The Journal of North African Studies*, vol. 5, no. 2. 2000: hlm. 20-22.

⁷⁴ Miller, *op. cit*, hlm. 72-75.

sains, dan tata kelola administratif, dan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil penduduk kota, terutama anak-anak dari keluarga elite.

Sementara itu, pendidikan bagi mayoritas rakyat, terutama di wilayah pedalaman dan komunitas Berber, sangat terbatas. Pada 1950-an, tingkat buta huruf di kalangan penduduk Maroko sangat tinggi, dan pendidikan hanya menjangkau sekitar 10% dari total populasi anak usia sekolah.⁷⁵ Selain itu, upaya Prancis untuk memisahkan komunitas Berber dari pengaruh Islam melalui Berber Dahir (1930) menciptakan sistem hukum dan pendidikan adat tersendiri bagi masyarakat Berber, yang justru menimbulkan resistensi dan memperkuat gerakan nasionalisme melalui jaringan madrasah independen.⁷⁶

Kehadiran kolonial Prancis membawa modernisasi infrastruktur dan tata kota dengan membangun jalan, jalur kereta api, serta kawasan kota baru bergaya Eropa, namun tetap melestarikan dualisme hukum antara adat Berber dan syariah Islam.⁷⁷ Upaya pemisahan hukum adat dari syariat yang dilakukan melalui Berber Dahir (1930) memicu kebangkitan nasionalisme, terutama dari kalangan intelektual Arab-Muslim. Perlawanan terhadap penjajahan memuncak dengan berdirinya Partai Istiqlal pada tahun 1943, yang memobilisasi masyarakat dalam perjuangan menuju kemerdekaan, terlebih setelah pengasingan Sultan Muhammad V oleh Prancis pada 1953.⁷⁸ Di tengah tekanan kolonial, masyarakat Maroko tetap mempertahankan warisan budaya lokal seperti tradisi Halqa (pertunjukan cerita

⁷⁵ André Adam, *Histoire de Casablanca: des origines à 1914*. Rabat: Editions Techniques Nord-Africaines, 1968, hlm. 263-265.

⁷⁶ Michael Brett & Elizabeth Fentress, *The Berbers*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996, hlm. 194-195.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ C.R. Pennell, *op. cit.* hlm. 215-219.

rakyat), tarian Ahwash dari komunitas Berber, serta praktik keagamaan tasawuf (Sufi) yang berakar kuat dalam kehidupan spiritual rakyat Maroko. Kondisi sosial budaya inilah yang menjadi latar penting dalam partisipasi Maroko dalam solidaritas negara-negara Asia dan Afrika menjelang kemerdekaannya pada tahun 1956.⁷⁹

Sistem pendidikan di Maroko sangat dipengaruhi oleh struktur tradisional dan kemudian oleh kolonialisme Prancis dan Spanyol. Pendidikan tradisional Islam berbasis masjid dan madrasah merupakan bentuk utama pendidikan, dengan fokus pada pengajaran Al-Qur'an, hukum Islam (fiqh), tata bahasa Arab, dan studi agama. Lembaga pendidikan klasik seperti al-Qarawiyyin di Fez, yang berdiri sejak abad ke-9, menjadi pusat pembelajaran Islam terkemuka yang masih berfungsi hingga masa kolonial.⁸⁰

Pendidikan menjadi medan perjuangan identitas nasional Maroko sebelum kemerdekaan. Kalangan nasionalis Arab-Muslim memandang pendidikan sebagai alat penting untuk membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan, yang puncaknya tercermin dalam gerakan Partai Istiqlal dan dukungan terhadap Sultan Muhammad V.⁸¹

2.3.2 Tunisia

Tunisia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis (sejak 1881), dan kondisi sosial budayanya sangat dipengaruhi oleh dinamika penjajahan serta

⁷⁹ Vanessa Maher, *Women and Property in Morocco: Their Changing Relation to the Process of Social Stratification in the Middle Atlas*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974, hlm. 17-19.

⁸⁰ Mohamed El Mansour, "Education in Pre-Colonial Morocco: The al-Qarawiyyin University," *Islamic Studies*, vol. 21, no. 3. 1982: hlm. 133-136.

⁸¹ Edmund Burke III, *op. cit*, hlm. 109-112.

perlawanan nasional.⁸² Struktur sosial Tunisia saat itu terbelah antara masyarakat adat (mayoritas Muslim Arab-Berber) dan elite yang pro-kolonial atau mendapat pendidikan ala Barat. Budaya lokal yang berakar kuat dalam Islam, adat Berber, dan tradisi Arab perlahan-lahan mengalami tekanan akibat masuknya nilai-nilai Barat yang dibawa oleh kolonialis.⁸³

Bahasa Prancis mulai digunakan secara luas, terutama dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa, menggantikan kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa utama komunikasi resmi. Hal ini menciptakan kesenjangan budaya antara kelompok elite terdidik yang lebih terbuka terhadap budaya Barat dan rakyat biasa yang mempertahankan nilai-nilai tradisional. pendidikan di Tunisia sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam. Lembaga pendidikan utama adalah kuttab (sekolah dasar Qur'ani), madrasah, dan masjid universitas seperti Universitas Zaytuna di Tunis. Di lembaga-lembaga ini, kurikulum berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an, fikih (hukum Islam), tata bahasa Arab, dan ilmu agama. Universitas Zaytuna bahkan menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka di Afrika Utara sejak abad ke-8. Namun, selama masa kolonial, pendidikan Islam ini mengalami tekanan politik dan penurunan anggaran karena dianggap tidak sejalan dengan model sekuler kolonial.

Kolonial Prancis memperkenalkan sistem pendidikan sekuler yang didasarkan pada kurikulum Prancis dan bertujuan untuk mengasimilasi sebagian elite Tunisia ke dalam budaya dan nilai-nilai Prancis. Sekolah-sekolah kolonial seperti *écoles franco-arabes* dan *écoles françaises* mendominasi sistem

⁸² Chater, Khalifa. *Identité culturelle et colonisation: le cas tunisien*. Tunis: Éditions du CERES, 1992, hlm. 45-52.

⁸³ Kenneth J. *cit*, hlm. 78-85.

pendidikan formal. Meskipun terbuka untuk penduduk lokal, akses ke sekolah-sekolah ini sangat terbatas, dan hanya sebagian kecil anak-anak Tunisia, terutama dari kalangan elite, yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau tinggi. Di sisi lain, gerakan nasionalisme mulai bermunculan.

Munculnya gerakan nasionalis seperti Neo Destour yang dipimpin Habib Bourguiba mulai menghidupkan kembali semangat budaya nasional, mendorong penggunaan bahasa Arab, dan membangkitkan kebanggaan akan identitas Islam dan warisan sejarah Tunisia.⁸⁴

Dari segi budaya populer, meskipun Prancis memperkenalkan gaya hidup modern seperti film, mode, dan musik Barat, budaya tradisional tetap bertahan melalui kegiatan keagamaan, pasar-pasar tradisional (*souq*), kesenian rakyat seperti musik, dan perayaan keagamaan. Namun, kehidupan masyarakat Tunisia saat itu masih sangat dibatasi oleh segregasi sosial dan ketimpangan ekonomi yang tajam, yang menjadi salah satu latar belakang perjuangan menuju kemerdekaan nasional yang semakin menguat menjelang pertengahan 1950-an.⁸⁵

2.3.3 Aljazair

Sebelum Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, kondisi sosial budaya Aljazair berada di bawah dominasi kolonial Perancis yang berlangsung sejak 1830. Masyarakat Aljazair terbagi secara tajam antara kelompok kolonial Eropa (*pieds-noirs*) dan penduduk asli Muslim (Arab dan Berber). Kelompok Eropa menikmati berbagai hak istimewa politik, ekonomi, dan sosial, sementara

⁸⁴ Clement Henry Moore, *Tunisia Since Independence: The Dynamics of One-Party Government*. Berkeley: University of California Press, 1965, hlm. 17-21.

⁸⁵ Hafid Gafaiti, "Cultural Identity in Colonial Tunisia." *Research in African Literatures*, vol. 29, no. 1. 1998: hlm. 50-65.

penduduk lokal hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan tekanan struktural akibat kebijakan ekspropriasi tanah serta sistem pajak kolonial. Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial menekankan asimilasi melalui bahasa dan budaya Perancis, sekaligus menekan pendidikan tradisional Islam yang berbasis madrasah dan zawiya, sehingga tercipta kesenjangan budaya dan akses pendidikan antara kolon dan masyarakat asli.⁸⁶

Meski begitu, kehidupan sosial budaya tradisional tetap bertahan, terutama melalui peran institusi-institusi keagamaan Islam seperti zawiya dan jaringan tarekat Sufi, yang tidak hanya menjadi pusat spiritual tetapi juga pusat pendidikan dan penguatan identitas komunitas lokal. Praktik-praktik budaya lisan seperti puisi Berber (*asefru*) dan tradisi perempuan seperti boqala menjadi sarana penting dalam menjaga warisan identitas dan menjadi bentuk resistensi simbolik terhadap hegemoni kolonial. Di tengah tekanan kolonial, muncul pula kesadaran nasionalisme yang mulai tumbuh sejak awal abad ke-20, terutama melalui tokoh-tokoh dan organisasi seperti *Jam'iyyat al-'Ulamā' al-Muslimīn al-Jazā'irīyyīn* atau dalam bahasa Indonesia seperti Asosiasi Ulama Muslim Aljazair (AUMA) yang menolak asimilasi dan menekankan pentingnya bahasa Arab, agama Islam, serta kebudayaan lokal sebagai dasar perjuangan nasional.⁸⁷

Secara umum, kondisi sosial budaya Aljazair sebelum KAA menunjukkan dinamika kompleks: di satu sisi terdapat tekanan dan marginalisasi akibat kolonialisme, namun di sisi lain terdapat perlawanan budaya yang kokoh dan

⁸⁶ Asep Kamaluddin, "Dinamika Sejarah Perjuangan Rakyat Aljazair Melawan Penjajahan Prancis (1830-1962)," *Jurnal Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta*, vol. 13, no. 2. 2015, hlm. 131-142.

⁸⁷ Lila Abu-Lughod, "The Interpretation of Culture(s) after the Empire," *Cultural Anthropology*, vol. 7, no. 3. 1992: hlm. 431-447.

berkembang melalui jalur pendidikan Islam, sastra lisan, dan semangat nasionalisme. Kesadaran ini kelak menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan Aljazair yang mencapai puncaknya setelah KAA.⁸⁸

Sistem pendidikan di Aljazair sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Prancis yang bersifat diskriminatif dan eksklusif terhadap penduduk pribumi. Pendidikan formal yang dikembangkan oleh otoritas kolonial lebih mengutamakan bahasa dan kurikulum Prancis, serta ditujukan terutama bagi warga keturunan Eropa (*colons*) dan segelintir elite Aljazair yang dianggap loyal. Sebaliknya, mayoritas penduduk Muslim Aljazair mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan modern, baik dari segi jumlah sekolah, kualitas pengajaran, maupun penggunaan bahasa Arab.⁸⁹

Pendidikan tradisional berbasis Islam, seperti madrasah dan zawiya (pesantren lokal), tetap menjadi sarana utama pendidikan bagi masyarakat pribumi. Lembaga-lembaga ini mengajarkan bahasa Arab, ilmu agama, dan nilai-nilai kebudayaan lokal, dan sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan budaya serta identitas nasional yang terus ditekan oleh kolonialisme. Meskipun menghadapi tekanan dan pengawasan ketat dari pihak kolonial, jaringan pendidikan Islam di Aljazair tetap aktif dan menjadi wadah penyemaian semangat nasionalisme serta kesadaran dekolonisasi yang semakin menguat.⁹⁰

⁸⁸ Shepard, *op. cit.*, hlm. 37-44.

⁸⁹ Mohamed Benrabah, *Language Conflict in Algeria: From Colonialism to Post-Independence*. Bristol: Multilingual Matters, 2013, hlm. 42-46.

⁹⁰ David Prochaska, *Making Algeria French: Colonialism in Bône, 1870-1920*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hlm. 112-118.

2.4 Gerakan Nasionalisme

2.4.1 Maroko

Pandangan umum mengenai perkembangan gerakan nasional di Maroko adalah bahwa Perang Dunia II memiliki peran penting dalam proses transisi antar generasi menuju kemerdekaan dengan mempengaruhi Prancis untuk mengubah kebijakan mereka, serta berusaha membantu rakyat Maroko mencapai tujuan mereka secara konsisten tanpa berharap kemerdekaan palsu yang dijanjikan oleh Prancis.

Menurut beberapa sumber seperti John dan Nasr, benih Nasionalisme di Maroko mulai tumbuh pada bulan November 1925.⁹¹ Sebuah studi dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang mencari cara baru untuk memahami hubungan antara Maroko dan Protektorat Prancis.⁹² Dari kelompok studi ini, ide nasionalisme mulai menyebar ke seluruh masyarakat Maroko. Selanjutnya, sekelompok mahasiswa terkemuka dari Universitas Qaramiyyin terinspirasi oleh gerakan Salafi dalam konteks menandingi politik kolonial. Selain itu, sebagian besar anggota kelompok studi itu berasal dari kota tradisional Fez. Dari historisnya, mereka adalah kelompok yang berada di garda terdepan reformasi Makhzen untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh Eropa pada tahun 1912.⁹³

Dalam konteks ini, Timur Tengah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan nasional di Maroko. Contohnya adalah gerakan

⁹¹ John P. Halstead, *Rebirth of a Nation: The Origins of and Rise of Moroccan Nationalism 1912-1944*. Harvard: Harvard University Press, 1967, hlm. 66.

⁹² Abun-Nasr, *op. cit.* hlm. 368.

⁹³ Abd Allah Arawi, *Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain, 1830-1912*. Paris: F. Maspero, 1977, hlm. 62.

Kemalist Turki dan Salafi yang dipimpin oleh tiga tokoh penting yaitu Jamal al-Din al-Afghání, Muhammad 'Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridā.⁹⁴ Tuntutan pertama dari kelompok nasionalis mulai muncul ketika gerakan masyarakat terbentuk pada tahun 1930, saat kekuatan Protektorat Prancis di Afrika Utara terlihat sangat kuat. Pada saat itu, pemerintah Prancis mendesak Sultan untuk menerapkan aturan demi mengalokasikan suku Berber dibawah hukum adat bukan hukum Islam.⁹⁵ Meskipun hal ini merupakan hasil dari eksekutif yang dimulai lebih dari sepuluh tahun sebelumnya, para pemimpin nasional yang memiliki visi jelas tentang nilai-nilai sosial Islam dan syariah Islam dalam hukum Maroko tidak setuju dengan kritik tersebut. Jika dilihat dari segi politik, alasan tersebut jelas bagi Prancis dijadikan alat pemecah belah, merusak integritas dan kedaulatan Maroko. Terlepas dari hal tersebut, para nasionalis terang-terangan melakukan protes dengan Latif yaitu doa tradisional yang dilaksanakan pada saat mendesak.

Pada tahun 1930-an, para pengunjung rasa Latif menggunakan simbol-simbol yang mirip dengan organisasi tasawuf dan menyebut diri mereka sebagai zawiya. Selain kelompok tersebut, para nasionalis membentuk kelompok-kelompok lain yang dikenal sebagai Taifa. Pada tahun 1933, terjadi penambahan gerakan bersenjata dalam masyarakat yang disebut Kutlat al-Amal al-Watani, atau aksi blok nasional.⁹⁶ Sejak awal tahun 1927 di Rabat, mereka menggabungkan serangkaian pembuat kerajinan dan pahatan beserta para pedagang tradisional yang menderita akibat perubahan dalam sistem ekonomi yang disebabkan oleh Protektorat Prancis.

⁹⁴ Hourani, *op. cit.* hlm. 371-372.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Halstead, *op. cit.* hlm. 191.

Isu yang dikenal sebagai Dahir Berber telah menjadi topik yang kontroversial di Maroko. Hal ini diakibatkan karena Prancis percaya bahwa suku Berber dan Arab harus dipisahkan, dengan Berber tinggal di pedesaan dan Arab di kota-kota. Orang-orang Berber diasingkan ke pegunungan, yang disebut sebagai Bled as-Siba atau "tanah pembangkangan". Sementara itu, bagi orang-orang Arab yang tinggal di kota, desa-desa tersebut dikenal sebagai Bled al-Makhzen, atau "Tanah Pemerintahan".⁹⁷

Pemerintah Prancis telah mengubah isu perbedaan tadi menjadi masalah yang lebih politis. Akibatnya, kesenjangan sosial antara orang Berber dan Arab semakin melebar. Selain itu, karena orang Arab lebih banyak menghabiskan waktu di kota, mereka memiliki kemampuan fisik yang lebih buruk dibandingkan dengan orang Berber yang lebih sering berada di pegunungan. Sebagai hasilnya, sultan lebih cenderung membantu orang Berber daripada orang Arab untuk dijadikan tentaranya.⁹⁸

Berkat Dahir, gerakan nasionalis semakin membenci Prancis. Para nasionalis yang terkenal dengan ide perjuangan pergerakan Salafi berani tampil di ruang publik untuk mengkritik kebijakan Prancis yang dianggap merugikan Maroko. Selain itu, situasi di luar Maroko secara bertahap memberikan dukungan bagi mereka. Mungkin, orang-orang yang menentang atau bersimpati dengan pemerintah kini menjadi lebih berani untuk bersuara.

Meningkatnya dukungan yang diperoleh kalangan nasionalis selama kampanye panjang Dahir Berber menjadi tekad kuat bagi mereka untuk semakin

⁹⁷ Halstead. *op. cit.* hlm. 68.

⁹⁸ Edmund Burke III, *op. cit.*, hlm. 78.

berani dan menuntut pencabutan perjanjian pada tahun 1934.⁹⁹ Kampanye Dahir Berber menandai awal dari tujuan kalangan nasionalis agar Prancis tidak bersikap sewenang-wenang di Maroko dan mendorong terjalinnya kerjasama yang nyata antara orang Eropa dan orang Afrika Utara.

Gerakan nasionalis dihentikan pada tahun 1937, dan para pemimpinnya dikurung, dibuang, atau bahkan digulingkan. Prancis percaya bahwa dengan menangkap para pemimpin nasionalis, ancaman terhadap protektorat telah berakhir. Namun, di dunia nyata, para nasionalis telah membentuk kelompok pelajar yang terus-menerus mengganti nama mereka, sehingga menyulitkan pihak Prancis untuk melacak mereka. Upaya ini terus berlangsung hingga para pemimpin nasionalis dibebaskan oleh Prancis setelah masa pembukaan mereka.

Dalam hal organisasi, pemerintahan nasional yang mereka buat mulai berkembang pada tahun 1930-an. Awalnya dimulai dengan sekelompok kecil orang yang aktif, kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dengan struktur organisasi yang jelas. Di permukaan, ini adalah konsep puncak dan merupakan salah satu yang terdiri dari gerakan-gerakan kecil yang pernah ada sebelumnya. Organisasi nasionalis terinspirasi dari kelompok Komunis, Freemason, dan kelompok tarekat tradisional.¹⁰⁰

Struktur organisasi dan tanggung jawab pekerjaan yang mirip dengan organisasi yang mereka inspirasikan, gerakan nasionalis memiliki identitas yang unik. Hal ini melahirkan organisasi asli yang hanya ada di Maroko. Di masa

⁹⁹ K. Brown, *The Impact of the Dahir Berbere in Sale*. London: Duckworth, 1973, hlm. 201.

¹⁰⁰ C. R. Pennell. "Moroccan Nationalism: The Formation of an Elit". *The Historical Journal*, vol. 29. no. 3. 1986: hlm. 631-647.

depan, para gerakan nasionalis akan memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Maroko. Mobilisasi masyarakat yang mereka lakukan, termasuk dukungan terhadap pemberontakan dan demonstrasi untuk membantu Maroko meraih kemerdekaannya.

Selain negara-negara Afrika lainnya, Maroko juga merupakan protektorat Prancis berdasarkan Perjanjian Fez. Selain itu, Maroko pun dijajah oleh Spanyol, namun terdapat tokoh yang mewalau Spanyol dan terkenal bernama Amir Abdul Karim yang disebut dengan pahlawan Rif. Namun, Abdul Karim akhirnya ditangkap oleh tentara Spanyol yang bekerja sama dengan Prancis.¹⁰¹

Julukan negara protektorat membuat Maroko menginginkan kemerdekaan penuh. Segala hal dilakukan untuk mencapai kemerdekaan tersebut baik dalam jalur perundingan maupun perjuangan fisik. Jalur perjuangan fisik seringkali mengalami kegagalan disebabkan dari segi persenjataan jelas Prancis jauh lebih unggul. Sebab cara itulah yang disukai oleh pihak Prancis.

Selain menggunakan jalur kekerasan, Maroko juga berjuang melalui perundingan dan diplomasi. Maroko memainkan peran penting dalam kampanye Perang Dunia II, terutama pada tanggal 8 November 1942, ketika tentara Amerika mendarat di Maroko, yang menjadi momen bersejarah. Tahun berikutnya, Presiden Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat dan Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris mengadakan pertemuan rahasia di Maroko untuk Konferensi Kasablanka. Kemudian kemerdekaan Maroko terjadi sekitar akhir masa perang, yang didorong oleh kelompok nasionalis dengan dukungan kuat dari

¹⁰¹ C. R. Pennell. "A Country with a Government and a Flag: The Rif War in Morocco, 1921–1926". *Middle Eastern Studies*, vol. 22, no. 1. 1986: hlm. 57-75.

penduduk negeri. Partai Istiqlal juga dibangun pada tahun 1944 untuk melakukan perjuangan kemerdekaan tersebut. Partai ini mengeluarkan Manifesto Kemerdekaan Maroko pada 11 Januari 1944 yang menuntut pengakuan penuh atas kedaulatan Maroko dan mendapat dukungan luas dari rakyat serta Sultan Mohammed V. Upaya ini memperkuat tekanan internasional terhadap Prancis dan mempercepat proses menuju kemerdekaan.¹⁰² Pada akhirnya Konferensi Asia Afrika dilaksanakan tahun 1955, membuat Prancis semakin terdesak.

Gerakan nasionalisme di Maroko mengalami percepatan signifikan berkat pengaruh Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955. Meskipun Maroko belum merdeka ketika KAA diselenggarakan, para tokoh nasionalis Maroko memanfaatkan forum tersebut untuk memperjuangkan legitimasi internasional atas tuntutan kemerdekaan mereka dari penjajahan Prancis dan Spanyol. Kehadiran perwakilan Maroko di KAA sebagai pengamat menunjukkan bahwa perjuangan bangsa ini telah mendapat perhatian dari komunitas internasional, khususnya dari negara-negara Asia dan Afrika yang juga mengalami atau baru saja keluar dari penjajahan. KAA tidak hanya menyuarakan solidaritas politik, tetapi juga menyatukan semangat antiimperialisme yang melintasi batas regional. Prinsip-prinsip Bandung seperti penghormatan terhadap kedaulatan, penolakan terhadap intervensi asing, dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan menjadi dasar moral dan ideologis bagi gerakan nasionalis Maroko. Tokoh-tokoh seperti Allal El Fassi dan Ahmed Balafrej menjalin hubungan erat dengan pemimpin negara-negara Asia seperti India, Indonesia, dan Mesir, serta

¹⁰² Franklin D. Roosevelt, *The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt*, 1943. Washington DC: United States Government Printing Office, 1950, hlm. 32.

memanfaatkan momentum solidaritas Asia-Afrika untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap Prancis. Dukungan ini terbukti penting dalam mempercepat proses negosiasi yang mengarah pada kemerdekaan Maroko pada 2 Maret 1956. Konferensi Asia-Afrika tidak hanya berperan sebagai simbol solidaritas, tetapi juga menjadi instrumen konkret dalam memperkuat gerakan nasionalisme Maroko dan mempercepat dekolonisasi.¹⁰³

2.4.2 Tunisia

Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Negara ini merupakan negara Muslim yang berada di pesisir Mediterania, berbatasan dengan Aljazair di barat dan Libya di selatan. Tunisia memiliki posisi yang strategis dari segi geografis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara Timur dan barat Jazirah Arab sehingga menjadi kawasan penting dalam jalur perdagangan.¹⁰⁴ Secara resmi, Tunisia dikenal sebagai *Republic of Tunisia*, atau *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*. Karena lokasinya yang strategis, Tunisia menjadi sasaran jajahan yang empuk. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai negara jajahan. Dengan banyak yang menguasai seperti Fenisia, Romawi, Vandal, Bizantium, Arab, Turki, dan Prancis paling akhir.¹⁰⁵ Tunisia ditempati oleh orang-orang Berber asli, dan sebelum kedatangan Islam negara ini dikenal dengan nama *Ifriqiya* yang kelak menjadi asal muasal nama Afrika.¹⁰⁶

¹⁰³ Wildan Sena Utama, *Konferensi Asia Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*, Yogyakarta: Ombak, 2018. hlm. 127-132.

¹⁰⁴ Miller, *op. cit*, hlm. 1-3.

¹⁰⁵ Abun-Nasr, *op. cit*, hlm. 18-22.

¹⁰⁶ Charles-André Julien, *History of North Africa: Tunisia, Algeria, Morocco*. London: Praeger, 1970, hlm. 23.

Tunisia direbut oleh Prancis pada 12 Mei 1881, setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Turki Usmani.¹⁰⁷ Peristiwa ini mengubah status Tunisia menjadi negara jajahan Perancis. Selama masa penjajahan, Prancis melakukan beberapa hal di Tunisia, termasuk mengembangkan sistem pertanian modern, pendidikan modern, dan mengubah sistem hukum dan pertahanan lokal.¹⁰⁸ Dalam bidang pendidikan, kerjasama antara Prancis dan Gereja Katolik juga berkembang di Tunisia. Selain itu, kepemimpinan Masjid Zaitunah juga sedang mengalami proses modernisasi.¹⁰⁹

Selama masa penjajahan Prancis, kehidupan politik di Tunisia umumnya berlangsung damai. Namun, rakyat Tunisia merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ditaklukan Prancis.¹¹⁰ Tekad untuk menjadi negara yang bebas dan merdeka mendorong semangat perjuangan mereka. Pada tahun 1919, rakyat Tunisia menginginkan kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun sudah bisa dipastikan Prancis menolak mentah-mentah keinginan tersebut.¹¹¹

Dari protes tersebut, Partai Destour dibentuk, yang kemudian terpecah menjadi dua bagian, yaitu Old Destour dan Neo Destour. Habib Bourguiba menjadi pemimpin partai yang baru ini. Melalui Neo Destour, Bourguiba bertujuan untuk menyatukan rakyat Tunisia dan mengakhiri rezim Prancis. Popularitas Bourguiba semakin meningkat di kalangan rakyat Tunisia. Karena

¹⁰⁷ Miller, *op. cit.* hlm. 45.

¹⁰⁸ Ageron, *op. cit.* hlm. 67-68.

¹⁰⁹ Kenneth J. *op. cit.* hlm. 58-61.

¹¹⁰ Perkins, *op. cit.* hlm. 71-73.

¹¹¹ Miller, *op. cit.* hlm. 84-86

pemerintah Prancis tidak ingin mengambil risiko, mereka akhirnya menangkap Bourguiba dan menghilangkan partainya.¹¹²

Pada saat Jepang dan Italia menginvasi Tunisia selama Perang Dunia II tahun 1942 dan 1943 Bourguiba dibebaskan,. Setelah tiga tahun Jerman dan Italia menguasai Tunisia, akhirnya berhasil dikalahkan Amerika dan sekutunya. Sehingga Tunisia kembali berada di bawah kendali Prancis.¹¹³ Ketika Prancis menginvasi Tunisia untuk kedua kalinya, situasi semakin memburuk. Bourguiba yang pada masa Jerman-Italia dibebaskan, telah menyebarkan semangat nasionalisme kepada rakyat Tunisia, yang menyebabkan meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan mereka, dan pengaruh Bourguiba tidak dapat diabaikan meskipun Prancis masih menguasai mereka.¹¹⁴

Rakyat Tunisia melakukan protes terhadap rezim Prancis pada tahun 1950.¹¹⁵ Tentu saja, ini dipengaruhi oleh Bourguiba dan partai Neo Destournya, yang mengusung sikap antikolonialisme. Prancis merasa tidak tenang setelah menghadapi perlawanan fisik tersebut. Pemerintah Prancis kemudian mengambil tindakan terhadap para pemimpin yang terlibat dalam protes itu. Nama-nama seperti Bourguiba, Mohammad Chenik, dan Salah Ben Youssef pun ditangkap dan dijerumuskan ke penjara.¹¹⁶

Prancis salah langkah dengan mengambil tindakan terhadap para pemimpin organisasi dengan menjerumuskannya ke penjara. Akibatnya, rakyat Tunisia

¹¹² Ageron, *op. cit.* hlm. 115.

¹¹³ Philip C. Naylor, *Historical Dictionary of Algeria*. Lanham: Scarecrow Press, 2006, hlm. 111-113.

¹¹⁴ Moore, *op. cit.*, hlm. 15-17.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 17-19.

¹¹⁶ Safwan M. Masri, *Tunisia: An Arab Anomaly*. New York: Columbia University Press, 2017, hlm. 56.

semakin bertekad untuk mencari kebebasan. Pengalaman ini juga bisa menjadi motivasi atau inspirasi untuk mengejar tujuan perlawanan yang lebih besar. Dengan situasi perlawanan dan politik Tunisia yang semakin memburuk, Prancis secara bertahap kehilangan kekuasaannya. Setelah lima tahun tidak mampu mematikan gerakan nasionalis rakyat Tunisia, Prancis akhirnya dengan sangat enggan mengadakan referendum untuk rakyat Tunisia pada tahun 1955.¹¹⁷

Gerakan nasionalisme di Tunisia mendapat dorongan kuat dari semangat antikolonialisme yang disuarakan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955. Meskipun Tunisia belum memperoleh kemerdekaan secara resmi saat konferensi berlangsung, KAA menjadi momentum penting dalam memperkuat legitimasi internasional atas tuntutan kemerdekaan rakyat Tunisia dari penjajahan Prancis. Para pemimpin nasionalis Tunisia seperti Habib Bourguiba memanfaatkan simpati dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika untuk menguatkan posisi diplomatik Tunisia di panggung internasional. Solidaritas yang tercipta dalam KAA menginspirasi Tunisia untuk menegaskan hak atas penentuan nasib sendiri, dengan mengedepankan prinsip-prinsip Bandung seperti penolakan terhadap kolonialisme, penghormatan terhadap kedaulatan, dan dukungan terhadap gerakan pembebasan nasional.¹¹⁸

Konferensi ini juga membuka jalur komunikasi antara gerakan nasionalis Tunisia dengan negara-negara seperti India, Indonesia, dan Mesir yang telah lebih dahulu merdeka dan aktif memperjuangkan dekolonisasi di forum internasional.

¹¹⁷ L. Carl Brown, *The Tunisia of Ahmad Bey: 1837-1855*. Princeton: Princeton University Press, 1974, hlm. 212.

¹¹⁸ Habib Bourguiba, *La Lutte du peuple tunisien pour l'indépendance nationale*, Tunis: Maison tunisienne de l'édition, 1974, hlm. 229-235.

Tunisia, sebagai bagian dari kawasan Afrika Utara yang strategis, memperoleh simpati khusus dari negara-negara Asia yang melihat perjuangan rakyat Tunisia sebagai bagian dari perjuangan kolektif Global Selatan melawan imperialisme.¹¹⁹

Tunisia meraih kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 20 Maret 1956. Habib Bourguiba, yang merupakan pemimpin Partai Destour dan memimpin rakyat Tunisia menuju kemerdekaan kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri. Bourguiba lalu membentuk sebuah komite untuk membuat undang-undang dasar di Tunisia, yang dikenal sebagai *National Constituent Assembly*.¹²⁰ Tunisia menjalin hubungan erat dengan negara-negara yang sebelumnya berpartisipasi dalam KAA, baik dalam bidang diplomasi, ekonomi, maupun sosial budaya menjadi sebuah kelanjutan dari semangat solidaritas yang berakar dari Konferensi Bandung. KAA tidak hanya berkontribusi secara moral dan politis dalam perjuangan kemerdekaan Tunisia, tetapi juga meletakkan dasar bagi keterlibatan aktif Tunisia dalam gerakan Non-Blok dan solidaritas negara-negara Global Selatan pascakemerdekaan.¹²¹

2.4.3 Aljazair

Nasionalisme Aljazair berkembang dari perjuangan tiga kelompok yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang Aljazair yang ingin berkarir di bidang keuangan dan mendapatkan rute ke pendidikan Prancis. Mereka sering kali perlu berasimilasi dan menjalankan taktik reformis secara bertahap, menghindari tindakan ilegal, dan bersedia mempertimbangkan persatuan

¹¹⁹ Utama, *op. cit.*, hlm. 126-130.

¹²⁰ Lisa Anderson, "Political Pacts, Liberalism, and Democracy: The Tunisian National Pact of 1988," *Government and Opposition*, vol. 26, no. 2. 1991: hlm. 244.

¹²¹ Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection: Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955*, Jakarta: Pustaka Antara, 1980, hlm. 109-113.

permanen dengan Prancis jika hak-hak orang Prancis juga dapat diberikan kepada penduduk asli Aljazair. Kelompok ini yang sudah ada sejak sebelum Perang Dunia I, telah terorganisir sejak lama dengan nama Aljazair Muda. Anggotanya pada tahun 1920-an termasuk Khaled Ben Hachemi ("Emir Khaled"), cucu Abdelkader, dan pada tahun 1930-an, Ferhat Abbas yang nantinya menjadi Perdana Menteri pertama pemerintah sementara Republik Aljazair.¹²²

Kelompok kedua yang terdiri dari para reformis Muslim yang terilhami oleh pemimpin gerakan Salafi yang dibangun di Mesir pada akhir abad 19, di bawah bimbingan Syekh Muhammad Abduh. Asosiasi Muslim Aljazair *Jam'iyyat al-'Ulamā' al-Muslimīn al-Jazā'irīyyīn* didirikan pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Syekh Abdulhamid Ben Badis. Kelompok ini bukan sebuah partai politik, melainkan identitas Muslim yang kuat di kalangan penduduk Aljazair.¹²³

Kelompok ketiga yang lebih besar ini lebih bersifat proletar dan radikal. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk para pekerja Aljazair di Prancis pada tahun 1920-an di bawah kepemimpinan Ahmed Messali Hadj, dan kemudian berkembang untuk mencakup Aljazair itu sendiri. Messali Hadj berusaha menarik perhatian orang Aljazair, yang selalu menyadari kekurangan mereka. Sikap nasionalis yang kuat dari Messali Hadj, atau bahkan posisi Ben Badis yang lebih tenang, dapat dibandingkan dengan reformis bertahap seperti Ferhat Abbas jika mereka dapat menunjukkan bahwa dekolonisasi yang diinginkan mungkin dapat dicapai. Beberapa inisiatif untuk meliberalisasi perbuatan bagi penduduk Aljazair, yang didorong oleh kelompok reformis Prancis, sejalan dengan reformasi Aljazair

¹²² Ageron, *op. cit*, hlm. 104.

¹²³ Ruedy, *op. cit*, hlm. 91.

selama paruh pertama pertama abad 20, dikatakan terlambat untuk menahan gelombang radikal.¹²⁴

Salah satu usulan, yaitu Usulan Blum-Viollette (untuk jabatan gubernur Prancis dan Aljazair), diperkenalkan selama masa kepresidenan Prancis pada tahun 1936-1937. Usulan ini akan memungkinkan lebih banyak warga Aljazair untuk mendapatkan status penuh sebagai warga Prancis tanpa harus melepaskan hak mereka untuk diadili oleh pengadilan Muslim terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan status pribadi mereka. Namun, pernyataan ini berpotensi menjadi masalah karena isu tersebut telah dimanfaatkan secara sistematis oleh penduduk pemukim, yang menyadari bahwa banyak warga Aljazair tidak ingin menghadapi situasi tersebut.¹²⁵

Sebagian kecil masyarakat Aljazair yang akan mendapatkan kewarganegaraan penuh Prancis seperti veteran militer Prancis yang terpelajar, dan kelompok-kelompok lain yang didefinisikan secara sempit dapat meningkat secara bertahap pada tahun selanjutnya. Namun, penentangan dari pemukim terhadap tindakan ini sangat kuat, sehingga proyek ini tidak pernah sampai pada pengumpulan suara di Kamar Deputi Prancis. Banyak pengikut Aljazair percaya bahwa protes perlawanan fisik terorganisir adalah satu-satunya pilihan yang layak, karena semua cara untuk menyelesaikan masalah dengan damai terhadap pemerintah kolonial bagi sebagian besar rakyat tidak diterima. Saat ini, kelompok misi yang dikenal sebagai Front Pembebasan Nasional (*Front de Libération Nationale*; FLN) muncul dari organisasi Messali Hadj dan telah berkembang

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

¹²⁵ Malika Zeghal, *Islamism in Algeria: A Reformist Movement Under Pressure*. Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 42.

untuk mencakup dua kelompok nasional lainnya.¹²⁶ Kelompok Front Pembebasan Nasional (*Front de Libération Nationale*; FLN) semakin berkembang setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika.

Gerakan nasionalisme di Aljazair mendapat pengaruh signifikan dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, meskipun secara resmi Aljazair masih berada di bawah penjajahan Prancis dan belum menjadi negara peserta. Namun, delegasi *Front de Libération Nationale* (FLN) yang mewakili gerakan kemerdekaan Aljazair hadir secara informal dalam konferensi tersebut dan mendapat simpati serta dukungan moral dari negara-negara Asia dan Afrika yang telah merdeka. KAA menjadi titik balik penting dalam internasionalisasi perjuangan rakyat Aljazair, karena forum tersebut memberikan ruang bagi isu kolonialisme di Afrika Utara untuk disuarakan di tingkat global.¹²⁷

Dukungan moral dan politik dari negara-negara peserta KAA memberikan legitimasi kepada FLN sebagai perwakilan sah perjuangan kemerdekaan Aljazair. Negara-negara seperti Mesir, India, Indonesia, dan Tiongkok secara aktif menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Aljazair. Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser bahkan menjadi salah satu pendukung utama FLN dengan menyediakan bantuan logistik, pelatihan militer, dan dukungan diplomatik di forum internasional. KAA memperkuat jaringan solidaritas antikolonial yang kemudian menjadi fondasi penting bagi pengakuan internasional atas perjuangan Aljazair di PBB dan Gerakan Non-Blok.¹²⁸

¹²⁶ Stora, *op. cit*, hlm. 47.

¹²⁷ Utama, *op. cit*, hlm. 128-134.

¹²⁸ Lazreg, *op. cit*, hlm. 77-79.

Selain pengaruh langsung terhadap penguatan gerakan nasionalis, KAA juga membentuk kerangka ideologis yang memperkuat narasi kemerdekaan Aljazair sebagai bagian dari gelombang besar dekolonisasi global. Semangat Bandung yang menekankan kedaulatan, kesetaraan, dan penolakan terhadap imperialisme diadopsi oleh para pejuang kemerdekaan Aljazair sebagai dasar legitimasi perjuangan mereka. Konferensi ini turut mempercepat proses delegitimasi kekuasaan kolonial Prancis di mata dunia internasional. Meskipun Aljazair belum merdeka saat KAA, konferensi tersebut berperan besar dalam membuka jalan menuju kemerdekaan pada 5 Juli tahun 1962 melalui penguatan solidaritas dan diplomasi internasional.¹²⁹

¹²⁹ Ali Merad, *L'islam dans l'Algérie contemporaine*, Paris: Seuil, 1967, hlm. 214-218.